

THE NORMALIZATION OF TURKEY–SAUDI ARABIA RELATIONS IN THE ERDOĞAN ERA: STRATEGIC INTERESTS AND INTERNATIONAL RESPONSES

NORMALISASI HUBUNGAN TURKI–ARAB SAUDI DI ERA ERDOĞAN: KEPENTINGAN STRATEGIS DAN RESPONS INTERNASIONAL

Muhammad Hayyi' Lana Alkhan^{1*}, Ahmad Fauzi², Aning Kesuma Putri³

^{1,2,3}Universitas Bangka Belitung, Indonesia

*Corresponding author: alkan@ubb.ac.id

ABSTRACT

The relationship between Turkey and Saudi Arabia has undergone a significant transformation in recent years, particularly under the leadership of President Recep Tayyip Erdoğan. This article seeks to analyze the underlying factors behind the normalization process between the two countries, considering not only political, economic, and security dimensions but also the often-overlooked ideological aspect. Historically, Turkey and Saudi Arabia have maintained opposing ideological stances, particularly regarding their positions on Islamist movements such as the Muslim Brotherhood. This study employs a qualitative methodology based on a comprehensive literature review and secondary data analysis. The findings indicate that the normalization is driven by multiple factors, including political alignment, ideological recalibration, economic interests, and security concerns. Moreover, international responses to this normalization have been mixed, with some countries expressing support while others remain critical.

المخلص

في السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات بين تركيا والمملكة العربية السعودية تحولاً كبيراً، لا سيما في ظل قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان. ويهدف هذا المقال إلى دراسة العوامل الكامنة وراء عملية تطبيع العلاقات بين البلدين، ليس فقط من الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية، بل أيضاً من البعد الأيديولوجي الذي غالباً ما يتم تجاهله. ويُعزى ذلك إلى أن تركيا والمملكة العربية السعودية، من الناحية التاريخية، كانتا تقفان على طرفي نقيض من الناحية الأيديولوجية، وخاصة فيما يتعلق بالموقف من الحركات الإسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين. وتستند هذه الدراسة إلى منهج نوعي يعتمد على تحليل المصادر المكتوبة والبيانات الثانوية. وتُظهر نتائج الدراسة أن هناك عدة مصالح تقف وراء مسار تطبيع تركيا مع المملكة العربية السعودية، من أبرزها المصالح السياسية، والمصالح الأيديولوجية، والمصالح الاقتصادية، والمصالح الأمنية. أما على الصعيد الدولي، فقد تباينت ردود الأفعال إزاء هذا التطبيع، إذ أبدت بعض الدول تأييدها له، في حين أبدت دول أخرى معارضتها له.

Keywords:
Erdoğan; Relations;
Saudi Arabia;
Normalization;
Turkey.

Article History:

Received: 2024-12-27
Revised: 2025-04-27
Accepted: 2025-05-19
Publish: 2025-06-10

الكلمات المفتاحية:
أردوغان؛ السعودية؛
العلاقات؛ التطبيع؛
تركيا.

This is an open access
article under the CC
BY-SA license.



PENDAHULUAN

Dewasa ini, normalisasi merupakan salah satu isu yang menjadi topik di dunia internasional. Normalisasi muncul pertama kali pada bidang kesehatan yakni pada tahun 1800. Kemudian normalisasi ini berkembang kepada arah politik yang selanjutnya menjadi konsep dalam suatu hubungan diplomasi negara. Barston (2014: 52) mengartikan normalisasi sebagai suatu proses dalam menciptakan kesepakatan bersama yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan persoalan dan perselisihan melalui berbagai cara seperti perjanjian damai, gencatan senjata, atau melaksanakan hubungan diplomatik.

Dalam konteks perdamaian di Timur Tengah, Turki adalah salah satu negara yang terus berupaya dalam mewujudkan perdamaian di kawasan di Timur Tengah terkhusus dengan negara Arab Saudi. Upaya tersebut bertujuan untuk membangun hubungan diplomatik yang bersahabat antara negara Turki dengan Arab Saudi. Hubungan antara kedua negara dibuktikan dengan adanya kedutaan besar pada kedua negara. Turki mempunyai Kedutaan Besar yang bertempat di Riyadh dan Konsulat Jenderal yang berada di Jeddah. Sedangkan Arab Saudi mempunyai Kedutaan Besar yang bertempat di Ankara dan Konsulat Jenderal berada di Istanbul.

Menurut sejarah, hubungan antara Turki dengan Arab Saudi memiliki hubungan yang baik di bidang ekonomi. Akan tetapi dalam bidang politik hubungan antara kedua negara memiliki kerenggangan. Dinamika hubungan antara kedua negara ini dinilai cukup kompleks, yang kerap kali terjadi pasang surut serta pro kontra dalam berbagai pandangan terkait kepentingan dan ideologi. Akibatnya, dapat dikatakan hubungan kedua negara ini sebagai hubungan "*frenemies*" yang berarti negara yang menjadi teman sekaligus rival atau saingan. Tercatat dari tahun 2017 hingga 2020, Turki dan Arab Saudi kerap kali menunjukkan sikap dan perspektif mereka yang bertentangan. Kerumitan hubungan antara kedua negara diperparah dengan adanya kasus pembunuhan terhadap jurnalis Arab Saudi, Jamal Khashoggi yang terjadi di Konsulat Arab Saudi di Turki. Adanya kasus ini, pemerintah Turki menuduh Muhammad bin Salman (MBS), putra mahkota Arab Saudi, sebagai dalang atas peristiwa tersebut. Persoalan ini menjadikan hubungan antara Turki dan Arab Saudi menjadi hubungan terburuk dalam sejarah kedua negara.

Selama tahun 2019 hingga 2020, permasalahan antara Turki dan Arab Saudi masih belum membaik. Terlihat Arab Saudi sering memberi ancaman terhadap tindakan Turki. Seperti tindakan Turki dalam serangan di Irak Utara, agresi Turki di sebelah timur laut Suriah, hingga keterlibatan Turki dalam peperangan di Libia. Kasus lain, adanya pemberitaan kurang baik yang dilakukan Turki terhadap Kerajaan Arab Saudi yang kemudian Pemerintah Arab Saudi memblokir seluruh akses menuju ke portal berita Turki yaitu TRT Arabic dan Anadolu Agency. Sebab hal tersebut dinilai sebagai lanjutan dari kebijakan baru Arab Saudi terhadap Turki. Selain itu, pada pertengahan 2020, adanya seruan pemboikotan yang dilakukan oleh pengusaha swasta Arab Saudi terhadap produk-produk Turki sebagai balasan terhadap perselisihan antara Turki dan Arab Saudi.

Pada tahun 2022, Erdoğan secara mengejutkan menyatakan bahwa Turki hendak menunjukkan hubungan baik dengan Arab Saudi. Pemerintah Turki menyebutkan bahwa mereka hendak memperbaiki hubungan mereka dengan Arab Saudi. Terkait kasus pembunuhan jurnalis Arab Saudi, pemerintah Turki telah menghormati apa pun keputusan dari pengadilan Arab Saudi terkait permasalahan tersebut. Pihak Turki terus berupaya mencari berbagai cara untuk memperbaiki hubungan mereka dengan Arab Saudi. Turki juga berharap agar pihak Arab Saudi ingin melakukan perdamaian serta mencabut pemboikotan terhadap produk-produk dari Turki.

Normalisasi hubungan antara Turki dan Arab Saudi telah menarik perhatian banyak peneliti dalam beberapa tahun terakhir. Ozturk (2022) menelaah dinamika kekuasaan, identitas negara, dan peran agama dalam membentuk hubungan kedua negara selama dua

dekade terakhir. Tekines (2023) menggarisbawahi pentingnya KTT *al-Ūlā* sebagai titik balik dalam normalisasi hubungan Turki dengan negara-negara Teluk, termasuk Arab Saudi. Di sisi lain, Balta (2024) menyatakan bahwa kebijakan luar negeri Turki pasca Pemilu 2023 semakin pragmatis dan transaksional, dengan fokus pada pemulihan ekonomi dan stabilitas regional. Laporan terbaru juga menyebutkan bahwa tahun 2024 diprediksi menjadi masa keemasan hubungan ekonomi antara Turki dan Arab Saudi (Daily Sabah, 2024).

Namun demikian, sebagian besar studi terdahulu lebih menyoroti aspek tunggal seperti ideologi, ekonomi, atau pergeseran politik luar negeri, dan belum mengkaji secara komprehensif bagaimana kepentingan politik, ekonomi, dan keamanan saling terhubung dalam proses normalisasi ini. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menelaah secara holistik dimensi-dimensi tersebut sekaligus, serta memperluas pembahasan dengan memasukkan respons dunia internasional terhadap proses normalisasi. Dengan demikian, artikel ini menghadirkan *novelty* dalam memahami strategi normalisasi Turki terhadap Arab Saudi pada era Erdoğan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Creswell (2013: 4) menjelaskan penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk menjelajahi serta memahami arti dari suatu permasalahan sosial dan kemanusiaan pada suatu kelompok dalam masyarakat. Senada dengan Creswell, Patton dan Cochran (2002: 2) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah memahami beberapa aspek kehidupan sosial dengan menggunakan metode seperti pada umumnya sehingga menghasilkan data berupa kata-kata bukan angka. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif karena penelitian ini akan menjabarkan apa yang melatarbelakangi normalisasi Turki terhadap Arab Saudi serta bagaimana respons dunia internasional terhadap normalisasi tersebut. Sumber data penelitian ini bersumber dari buku, artikel ilmiah, berita serta literatur yang berkaitan dengan normalisasi Turki terhadap Arab Saudi. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik baca-catat. Kemudian teknik analisis data menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman (1994), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Turki dan Arab Saudi Pra Normalisasi

Turki dan Arab Saudi adalah dua negara yang berada di kawasan Timur Tengah. Selain itu, kedua negara ini sejak dahulu dikenal sebagai negara yang memiliki umat Islam yang kuat. Karena itu, kedua negara ini mempunyai pengaruh yang besar dalam geopolitik dibandingkan negara lainnya yang berada dalam kawasan Timur Tengah. Hubungan antara Turki dan Arab Saudi memiliki hubungan yang baik dan bersahabat termasuk hubungan dalam aspek ekonomi.

Menurut sejarah, dahulu Turki dikenal dengan masa keemasannya pada masa kekhalifahan Ottoman. Di sisi lain, Arab Saudi juga terkenal dengan negara yang menjadi pusat keislaman sejak lama, serta menjadi tempat kelahiran pemimpin umat Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW. yang kemudian telah diakui oleh negara-negara akan peran Arab Saudi di dunia internasional. Kedua negara ini terus berupaya membangun citra baik, serta memberi pengaruh terhadap negara-negara lain. Usaha kedua negara ini telah berjalan selama bertahun-tahun, hal ini terlihat pada masa pemerintahan Erdoğan dan MBS, kedua negara ini terus membangun kekuatan untuk mendapatkan citra baik dan pengaruh di dunia internasional (Joseph, 2018). Turki dahulu dikenal sebagai negara sekuler yang pro terhadap negara-negara Barat dan sangat anti dengan Islam. Akan tetapi sejak pada masa kepemimpinan Erdoğan, banyak dari kebijakan-kebijakan Turki yang

berpihak kepada Islam. Di antara kebijakan tersebut adalah upaya Turki dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina (Aydintasbas, 2018).

Meskipun Turki telah menjalin hubungan diplomatik dengan Arab Saudi sejak tahun 1932. Namun, hubungan antar kedua negara berjalan tidak stabil dan sering kali terjadi ketegangan. Hubungan antar kedua negara tersebut kerap kali terjadi pasang surut serta pro kontra terhadap suatu pandangan. Arab Saudi mengambil langkah untuk bersikap konfrontatif dalam hubungan politik luar negeri dengan Turki. Ini bertujuan untuk melindungi serta menjaga negara Arab Saudi dari ancaman Turki. Selain itu, Arab Saudi menilai kebijakan pemerintah Turki sering kali berlawanan dan mengancam kepentingan negaranya. Di antara kebijakan Turki yang bertentangan dengan Arab Saudi adalah dukungan Turki terhadap Qatar, bantuan Turki terhadap kelompok Ikhwanul Muslimin, serta keterlibatan Turki dalam persoalan Jamal Khashoggi. Hal ini berdampak pada keamanan, ekonomi serta ideologi Arab Saudi.

Dalam menyampaikan berbagai aspirasi di kawasan Timur Tengah, Turki dan Arab Saudi merupakan aktor utama yang paling menonjolkan dalam menjalankan peran tersebut. Kedua negara ini menawarkan diri dan bersaing sebagai pemimpin dunia Islam. Hal ini disebabkan oleh kedua negara tersebut merupakan negara yang mayoritas penduduknya muslim Suni. Selain itu, Turki dan Arab Saudi memiliki sejarah bahwa kedua negara pernah menjadi pemimpin dunia Islam dalam waktu yang berbeda. Oleh sebab itu, dewasa ini kedua negara saling memperebutkan kedudukan tersebut.

Pada tahun 2011 hingga 2017, yakni sejak peristiwa Arab Spring hingga *blockade* Qatar, perselisihan antara Turki dan Arab Saudi telah terjadi beberapa kali (Crocker, 2018). Akan tetapi, ini kemudian tidak bereskalasi menjadi persaingan atau konflik dalam skala besar. Sebagaimana konflik yang terjadi antara Arab Saudi dan Iran yang kemudian berdampak pada terputusnya hubungan diplomatik kedua negara. Selanjutnya, tahun 2018, Putra Mahkota Arab Saudi MBS melakukan hubungan diplomatik terhadap Amerika Serikat dan Inggris. Tujuan dari hubungan tersebut adalah untuk mengubah citra Arab Saudi yang sebelumnya dinilai negara yang konservatif menjadi negara yang monarki moderat. Selain itu, tujuan dari hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Amerika Serikat untuk menarik investor asing dalam menggerakkan ekonomi Arab Saudi guna mengakhiri ketergantungan terhadap minyak. Dalam perjalanan tersebut, MBS melakukan interaksi dengan Donald Trump dan Theresa May. Selain itu, Putra Mahkota itu juga berinteraksi dengan Mark Zuckerberg, CEO Facebook, Bob Iger, CEO Disney dan Aktor "The Rock", Dwayne Johnson (Wearing, 2018). ini mencerminkan bahwa Arab Saudi berambisi menjadikan Arab Vision 2030 sebagai harapan bagi negara-negara di Timur Tengah.

Pew Research Global Attitudes Project pada tahun 2013 melakukan sebuah penelitian tentang pandangan negara-negara di kawasan Timur Tengah terhadap Arab Saudi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa negara Turki merupakan negara yang memiliki pandangan paling banyak negatif terhadap Arab Saudi dengan persentase 53%, dan hanya 26% yang menyatakan positif. Hasil tersebut tidaklah perkara yang mengejutkan. Sebab dilihat dari beberapa hubungan diplomatik, hubungan antara Turki dan Arab Saudi kerap kali memiliki perbedaan pandangan dan pendapat dibanding persamaan dalam mengambil suatu keputusan. Misalnya, upaya Turki dalam menghentikan kasus pengucilan terhadap Qatar oleh negara-negara Arab yang diketuai Arab Saudi. Kasus tersebut disebabkan Qatar dituduh sebagai negara yang mendukung serta mensponsori kelompok teroris radikal yang kemudian memberi ancaman terhadap negara-negara Timur Tengah (Kusumadewi, 2017).

Kerenggangan hubungan antara Turki dan Arab Saudi juga terjadi pada Oktober 2014, di mana Arab Saudi memberi dukungan agar Turki keluar dari anggota Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal ini dikarenakan Arab Saudi tidak menyetujui

dukungan Turki atas kelompok Ikhwanul Muslimin (Avni, 2014). Sumber permasalahan antara Arab Saudi dan Ikhwanul Muslimin ini terletak pada perbedaan ideologi yang dianut. Kelompok Ikhwanul Muslimin dikenal sebagai kelompok yang berideologi Islam liberal yang memahami teks secara kontekstual. Selain itu, kelompok ini juga melakukan akomodasi nilai-nilai Barat ke dalam Islam seperti revolusi, demokrasi dan lain-lain. Sebaliknya, Arab Saudi merupakan negara yang berpaham ideologi Wahabi yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Ideologi dari Wahabi melarang keras istilah-istilah yang berasal dari Barat baik dari sisi praktik maupun semantik. Hal ini disebabkan ajaran yang tidak dibawa oleh Nabi (Suprio, 2013).

Pada tahun 2017, perselisihan antara Turki dan Arab Saudi juga terjadi saat konflik diplomatik Qatar. Awal mula konflik ini terjadi pada bulan Juni yakni ketika Arab Saudi bersama UEA, Mesir, Bahrain, Senegal, Mauritania, Yordania, Yaman, Libya, dan Komoros melakukan pelarangan terhadap pesawat dan kapal Qatar untuk melewati daerah teritorial negara-negara tersebut (Al-Arian, 2020). Pasca kejadian tersebut, Turki mengecam *blockade* terhadap Qatar, yang kemudian membantu dalamantisipasi kekurangan makanan dengan menyuplai persediaan makanan ke Qatar serta mengirim tentara Turki ke Qatar melalui peraturan perundangan Turki (Al-Haj, 2017). Kasus blokade ini didasarkan atas tuduhan kepada Qatar yang mendukung gerakan-gerakan terorisme yang telah melanggar terhadap perjanjian dengan *Gulf Cooperation Council* (GCC) (Newsweekme, 2017).

Tanggal 2 Oktober 2018, terjadi peristiwa tewasnya jurnalis Jamal Khashoggi. Peristiwa tersebut terjadi ketika Khashoggi mengurus surat pernikahan dengan tunangannya warga negara Turki, Hatice Tengiz (Saudeli, 2018). Khashoggi dikenal sebagai jurnalis yang kritis terhadap Kerajaan Arab Saudi. Namun, sejak saat tertentu, keberadaannya tidak diketahui. Pemerintah Turki kemudian melakukan penyelidikan dan meyakini bahwa Khashoggi telah dibunuh oleh pihak yang terkait dengan Kerajaan Arab Saudi. Pada awalnya, Kerajaan Arab Saudi membantah tuduhan yang disampaikan oleh pemerintah Turki. Namun, kemudian Arab Saudi mengakui keterlibatannya setelah muncul bukti berupa rekaman audio dan video. Pihak Arab Saudi menyatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan oknum jahat dari dalam lingkungan kerajaan (Chulov, 2018).

Kematian Jamal Khashoggi menjadi perbincangan internasional yang berdampak pada Arab Saudi dalam membentuk citra positif di kancah internasional dan sebaliknya meningkatkan pamor Turki pada dunia internasional. Peristiwa ini memberi dampak besar pada citra Arab Saudi yang telah dibangun selama ini. Selain itu, menurut investigasi yang dilakukan utusan *Federal Bureau of Investigation* (FBI) untuk PBB, Agnes Callamard, kasus ini juga telah menodai kinerja MBS sebab dianggap sebagai dalang atas pembunuhan tersebut (Callamard, 2019: 52).

Lebih lanjut, pada tahun 2019 juga terjadi perselisihan antara Turki dan Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi menyerukan untuk melakukan boikot terhadap semua produk Turki serta liburan ke Turki. Hal ini merupakan dampak dari kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di Kantor Konsulat Jenderal Arab Saudi di Istanbul yang kemudian Putra Mahkota MBS terlibat dalam kasus ini. Kerenggangan antara kedua negara ini berawal dari pasca pengumuman Turki terkait pembunuhan Khashoggi dan terus memberi tekanan kepada Arab Saudi agar memberi informasi terkait pelaku pembunuhan tersebut. *Central Intelligence Agency* (CIA) beranggapan bahwa dalang dibalik pembunuhan jurnalis tersebut adalah Putra Mahkota MBS, akan tetapi itu dibantah oleh Arab Saudi (Mahatma, 2019).

Kepentingan antara Turki dan Arab Saudi

Turki dahulu dikenal sebagai negara sekuler yang tidak menjadikan agama sebagai dasar pemerintahan. Sedangkan Arab Saudi dipandang sebagai negara konservatif yang

menerapkan secara ketat aturan-aturan Islam kepada masyarakat guna menjaga kemurnian syariat Islam. Kemudian dewasa ini, Turki pada masa Erdoğan dinilai sebagai negara yang mengalami perkembangan dalam sistem demokrasi serta bertumbuhnya ekonomi yang cukup signifikan. Di sisi lain, negara Arab Saudi dalam proses menjadi negara yang lebih moderat.

Pada tahun 2010, pemerintah Turki mulai mengubah arah kebijakan luar negerinya menuju pendekatan yang lebih proaktif. Selanjutnya, pada tahun 2012, pemerintah meluncurkan sebuah inisiatif strategis yang dikenal dengan sebutan Visi 2023. Inisiatif ini bertujuan untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Turki tengah membangun citra sebagai aktor global yang berpengaruh, sekaligus sebagai negara mediator dalam upaya menciptakan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Dalam kerangka tersebut, pemerintah Turki secara konsisten menjalin dialog dengan negara-negara di kawasan, termasuk Arab Saudi, guna mewujudkan kepentingan strategisnya (Parti, 2012).

Dalam konteks kepentingan Turki dengan negara-negara Timur Tengah, tujuan dari visi 2023 tidak sekedar pada pembangunan Turki secara nasional, tetapi juga berfokus pada pembangunan kawasan sekitar. Dalam artian, tujuan dari visi 2023 ini tidak hanya memberi keuntungan pada Turki, namun berdampak pada negara-negara sekitar maupun negara Timur Tengah lainnya. Dalam hal ini, Turki dan Arab Saudi berupaya untuk meningkatkan kerja sama dalam berbagai aspek baik politik, keamanan maupun ekonomi. Segala yang dilakukan oleh Turki ini dalam rangka mewujudkan era baru negara Turki. Dalam twitter(X)nya, Erdoğan mengatakan, “Sebagai dua bangsa yang bersaudara dalam ikatan sejarah, budaya dan manusia, kami berupaya untuk meningkatkan kerja sama dalam segala bidang terutama dalam politik, militer dan ekonomi dalam mewujudkan era baru” (Cakmak, 2022).

Kepentingan Politik

Dalam politik, tidak ada istilah lawan atau kawan abadi. Namun yang abadi adalah kepentingan. Sebab itu dinamika hubungan yang terjadi di negara-negara Timur Tengah mengalami pasang surut. Seperti halnya yang terjadi antara Turki dan Arab Saudi yang kerap kali terjadi pro-kontra terhadap suatu persoalan demi mencapai kepentingan. Hubungan antara Turki dan Arab Saudi mulai mengalami perbaikan ketika setelah Turki mengalami perubahan konstitusi dari parlementer menjadi presidensial dan Erdoğan terpilih menjadi presiden Turki pada tahun 2014 serta dibaiatnya Salman bin Abdul Aziz menjadi Raja Arab Saudi pada tahun 2015 (Mashuri, 2022).

Pada awal kepemimpinan Erdoğan, Turki lebih berhati-hati dalam memainkan perannya dalam dunia Islam sebab pembentukan sekulernya. Bila partai yang berorientasi Islam memegang kekuasaan di Turki serta hendak mengembangkan hubungannya dengan negara Islam maka akan berpotensi menimbulkan krisis legitimasi di Turki baik di hadapan Barat ataupun domestik yang mendukung adanya sekulerisme. Akan tetapi bila Turki dikuasai oleh partai selain Islam maka berpotensi memunculkan krisis legitimasi di sisi negara-negara Islam maupun negara Timur Tengah lainnya (Ozkan, 2017: 169). Pada akhirnya, karakter sekuler Turki yang dahulu cukup kuat mulai mengalami pelunakan dalam konteks kebijakan luar negeri. Dewasa ini, Ankara menunjukkan kecenderungan untuk mempererat hubungan dengan negara-negara Islam melalui berbagai inisiatif diplomatik dan kerja sama strategis (Kadriyah & Aziz, 2024).

Pada tahun 2015, Turki dan Arab Saudi mengadakan tiga kali pertemuan. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, kedua negara sepakat untuk membentuk Dewan Kerja Sama Strategis. Setahun kemudian, Dewan Koordinasi Turki-Saudi resmi dibentuk sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut. Pada bulan April 2022, pemerintah Turki menghentikan persidangan kasus pembunuhan Khashoggi dan memerintahkan

pemindahan berkas investigasi serta proses litigasi kepada otoritas kehakiman Turki. Selain itu, Presiden Erdoğan juga melarang kelompok garis keras yang selama ini menggunakan Turki sebagai sarana propaganda untuk menyerang negara-negara Teluk. Menurut pakar Timur Tengah, langkah yang diambil oleh Erdoğan ini bertujuan untuk memulihkan serta memperbaiki hubungan Turki dan Arab Saudi. Selain itu, juga merupakan usaha dalam menerobos isolasi diplomatik yang menjadi sebab terpuruknya ekonomi Turki (Mashuri, 2022).

Kunjungan Putra Mahkota Arab Saudi, MBS, ke Ankara menandakan adanya perbaikan hubungan Turki dan Arab Saudi. Kunjungan tersebut disambut baik oleh Turki. Meskipun sebelum kedatangan MBS ke Ankara mendapatkan berbagai hujatan dari media Turki, namun hal ini tidak berpengaruh pada kunjungan tersebut. Presiden Turki Erdoğan dan Putra Mahkota Arab Saudi MBS berjanji untuk mengatur ulang hubungan kedua negara. Keduanya juga berjanji untuk menyelesaikan permasalahan antar kedua belah pihak (Bimo, 2022). Jibril Al Ubaidi berpendapat bahwa kunjungan MBS ke Ankara merupakan keberhasilan Presiden Erdoğan dalam memulihkan dan memperbaiki arah kebijakan Turki yang mengedepankan prinsip “*nol masalah*” dalam hubungan luar negeri. Erdoğan mengatakan bahwa langkah yang dilakukan Turki guna untuk menutup lembaran lama dan membuka lembaran persahabatan baru dengan negara-negara Timur Tengah lainnya (Mashuri, 2022). Di sisi lain, Kantor Berita Arab Saudi (SPA), juga menerbitkan foto Presiden Erdoğan yang memeluk Putra Mahkota MBS. Intelijen Amerika Serikat menilai bahwa Arab Saudi menyetujui upaya perbaikan hubungan antara kedua negara.

Langkah presiden Erdoğan dalam menjalankan roda pemerintahan yang sekuler namun tetap menerapkan nilai-nilai Islam merupakan langkah yang unik bagi negara Turki. Kebijakan yang menggunakan pola pikir sekuler namun lebih condong terhadap Islam menjadikan kepercayaan masyarakat Turki dari berbagai elemen terhadap kepemimpinan Erdoğan meningkat (Ozkan, 2017). Dalam hal ini, Erdoğan menyatakan bahwa AKP bukanlah partai Islam serta menghormati adanya sekularisme. Realitas yang terjadi pada masyarakat dalam menentukan hak mereka di Turki adalah negara sebaiknya memiliki jarak yang sama dari segala keyakinan agama. Hal ini dikenal dengan prinsip “*lasisme*” yakni kebijakan yang berlandaskan pada jiwa kemanusiaan bukan pada agama (King, t.t.). Masyarakat muslim Turki dapat searah dengan apa yang diharapkan oleh kelompok pro “*Kemalisme*” dengan mengutamakan hak asasi manusia (HAM), pembangunan demokrasi, dan peningkatan ekonomi. Bila nilai-nilai politis Turki dinilai baik maka akan menambah kekuatan *soft power* dengan nilai-nilai moral yang dimilikinya yang kemudian dapat menjadi pedoman bagi negara lain.

Kepentingan Ideologi

Secara ideologi, Turki dan Arab Saudi berada pada kutub yang berbeda. Turki di bawah kepemimpinan Erdoğan secara terbuka menunjukkan afiliasi politik dan kedekatan dengan kelompok-kelompok Islamis seperti Ikhwanul Muslimin. Erdoğan bahkan kerap disebut sebagai simbol kebangkitan Islam politik di Timur Tengah pasca Arab Spring (Ozturk, 2022). Sebaliknya, Arab Saudi secara historis dan politis menentang keberadaan kelompok Islamis transnasional seperti Ikhwanul Muslimin yang dianggap mengancam stabilitas monarki dan tatanan Wahabi konservatif yang menjadi ideologi resmi kerajaan (Suprio, 2013: 2).

Namun, normalisasi tetap terjadi antara dua negara ini karena adanya pergeseran pragmatisme ideologis, di mana kedua negara menyadari bahwa pertentangan ideologis harus dikesampingkan demi kelangsungan kekuasaan domestik dan stabilitas kawasan. Erdoğan mulai melunak terhadap berbagai kelompok Islamis, tidak lagi memberikan dukungan terbuka seperti pada masa puncak Arab Spring. Salah satu indikatornya adalah pengetatan ruang gerak kelompok oposisi Islamis yang berbasis di Turki dan pembatasan

pemberitaan yang menyerang negara Teluk (Mashuri, 2022). Langkah ini menjadi sinyal bagi Arab Saudi bahwa Turki mulai menyesuaikan diri terhadap arsitektur keamanan regional yang didominasi oleh aktor anti-Islamis seperti UEA dan Saudi.

Di sisi lain, Arab Saudi di bawah Visi 2030 juga menunjukkan kecenderungan untuk mereduksi pendekatan wahabisme eksklusif menuju Islam yang lebih "terkendali dan nasionalis" (Sholihah dkk., 2023). Reformasi ini membuka ruang diplomatik yang lebih luas dengan negara seperti Turki, meskipun memiliki perbedaan ideologis. Selain itu, kebutuhan untuk melawan pengaruh Iran dan merespons gejolak internasional akibat penurunan keterlibatan Amerika Serikat di kawasan, menjadikan kesamaan strategis lebih penting daripada perbedaan doktrin. Dengan demikian, alasan utama terjadinya normalisasi secara ideologis adalah karena kedua negara telah mengadopsi pragmatisme politik dalam menghadapi tekanan global dan regional, yang lebih mengedepankan kepentingan nasional dan stabilitas kawasan dibandingkan loyalitas ideologis masing-masing.

Kepentingan Keamanan

Turki adalah negara yang berada di kawasan Asia dan Eropa. Sebab itu, kebudayaan yang berada di Turki banyak dipengaruhi oleh budaya Barat dan Timur. Sekularisme, demokrasi, dan ekonomi bebas merupakan aspek penting yang menjadi karakteristik Turki. Aspek-aspek tersebut membentuk identitas nasional Turki, termasuk dalam bidang keamanan militer. Kondisi ini dipengaruhi oleh posisi geopolitik Turki yang terletak di kawasan rawan konflik dan rentan terhadap ancaman dari negara-negara tetangga (Ustun, 2010). Selain itu, Turki adalah salah satu negara maju dalam industri keamanan dan pertahanan. Pada tahun 1952, Turki masuk dalam keanggotaan NATO yang dijadikan sebagai benteng dalam menghadapi ekspansi Uni Soviet ke Mediterania. NATO memiliki prinsip penting yakni mengedepankan prinsip *collective defence* yaitu segala sarana prasarana kemiliteran canggih milik NATO merupakan sarana kemiliteran milik Turki juga. Hal ini menjadikan Turki sebagai salah satu negara yang kuat dalam keamanan dan pertahanan (Alfian, t.t.: 64).

Terlepas dari kekuatan keamanan yang dimiliki Turki, negara ini sering mengalami ketegangan dengan beberapa negara, termasuk Arab Saudi. Berbagai peristiwa telah memicu kerengangan hubungan antara kedua negara, salah satunya adalah dukungan Turki terhadap Qatar ketika negara tersebut diisolasi oleh Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya. Puncak ketegangan terjadi dalam kasus pembunuhan jurnalis Arab Saudi, Jamal Khashoggi. Dalam kasus ini, Turki menuduh Putra Mahkota MBS sebagai dalang pembunuhan tersebut, sementara Arab Saudi membantah tuduhan tersebut (Mashuri, 2022).

Turki dan Arab Saudi saling berebut pengaruh serta kekuatan terhadap negara-negara di Timur Tengah. Arab Saudi menuduh pemerintahan Turki melindungi serta mendukung kelompok-kelompok radikal dan penentang yang kemudian menjadikan Turki sebagai tumpuan propaganda untuk melawan Arab Saudi dan negara teluk lainnya. Sebab itu, Arab Saudi memberikan balasan dengan memboikot semua produk dari Turki, melarang perusahaan dari Turki ikut serta dalam proyek pembangunan negara, serta pengurangan jumlah kuota jamaah haji dan umroh (Mashuri, 2022).

Selain itu, Amerika Serikat yang tidak lagi menjadi pelindung pertahanan Arab Saudi memicu berlakunya prinsip politik bahwa tidak ada musuh atau teman abadi, melainkan hanya kepentingan yang abadi. Oleh karena itu, demi menjaga kepentingan keamanan, Turki bersedia menutup kasus pembunuhan jurnalis sesuai permintaan Arab Saudi. Presiden Erdoğan menyatakan bahwa Turki lebih mengutamakan keamanan dan stabilitas kawasan Teluk. Dalam pernyataannya, Erdoğan mengatakan, "Pada setiap kesempatan, kami menyatakan bahwa kami lebih mengutamakan keamanan serta stabilitas saudara

kami di kawasan Teluk layaknya milik kami sendiri.” Ia menambahkan, “Kami menggarisbawahi bahwa kami menolak serta menentang segala macam terorisme dan lebih menekankan kerja sama dengan negara-negara kawasan dalam melawan terorisme.” (Cakmak, 2022). Erdoğan hendak membukakan jalan baru bagi Arab Saudi guna memulai menjalin kerja sama dan terciptanya berbagai tujuan (Bimo, 2022).

Pemerintah Turki dan Arab Saudi telah sepakat untuk menjalin kerja sama dalam berbagai bidang terutama bidang keamanan tekad mereka dalam menghadapi tantangan dan persaingan global. Kedua negara juga sepakat untuk memulai kembali perjanjian yang telah disetujui kedua negara dalam kerja sama di bidang pertahanan dengan cara akan melayani kepentingan kedua negara dalam keamanan dan stabilitas kawasan. Selain itu, kedua negara juga telah sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang hukum dan peradilan. Kerja sama kedua negara ini untuk memperdalam konsultasi mengenai isu-isu regional guna memperkuat perdamaian serta stabilitas kawasan di Timur Tengah (Ahval, 2022)

Kepentingan Ekonomi

Dewasa ini, Turki dan Arab Saudi hendak mengaktifkan kembali potensi-potensi dalam bidang ekonomi yang mempunyai peluang besar bagi kedua negara. Kedua belah pihak bertekad untuk mempercepat langkah dalam menghidupkan potensi ekonomi tersebut guna mewujudkan kepentingan bersama dan stabilitas kawasan. Pernyataan Erdoğan yang dilansir dari Reuters menyebutkan: “Kami bersama Arab Saudi sepakat untuk menghidupkan kembali potensi-potensi di bidang ekonomi dengan peluang besar yang dimiliki melalui organisasi yang hendak menyatukan investor kami.” (Pristandaru, 2022).

Di sisi lain, selain dalam rangka penyelesaian kasus pembunuhan jurnalis, pertemuan antara Erdoğan dan Raja Salman bin Abdul Aziz juga membahas mengenai permasalahan regional, hubungan bilateral dan internasional. Dalam kunjungan tersebut, Erdoğan menyatakan bahwa Turki akan terus memberi dukungan terhadap Arab Saudi sebagai tuan rumah Expo di Riyadh pada tahun 2030 mendatang. Pertemuan bilateral antara Turki dan Arab Saudi ini sebagai tanda puncak dari usaha atau upaya kedua negara dalam pemulihan hubungan serta memajukan ekonomi kedua negara (Wijaya, 2024). Hal ini terbukti ketika bantuan dana yang diberikan Arab Saudi kepada Turki dapat membantu mengurangi krisis ekonomi yang terjadi di Turki termasuk ketika memuncaknya inflasi menjelang pemilihan pemimpin Turki tahun depan.

Pada kasus pembunuhan Jurnalis tersebut, mata uang Turki mengalami kemerosotan terhadap dolar, terjadi lonjakan inflasi yang mencapai lebih dari 60 persen, serta banyak dari masyarakat Turki yang masuk dalam kemiskinan yang kemudian merusak popularitas Erdoğan. Menurut data dari Reuters, cadangan mata uang asing bersih bank sentral kemungkinan telah mengalami penyusutan sebanyak tujuh miliar dolar. Hal ini menempati tingkatan terendah dalam dua puluh terakhir. Selain itu, sejak volatilitas lira pada tahun 2018, cadangan devisa bank sentral Turki telah berkurang lebih dari 100 miliar dolar AS. Pada suatu titik, lira mengalami penurunan sebesar 0,2 persen dengan nilai tukar mencapai 17,35 lira per dolar AS. Hingga tahun 2022, mata uang Turki telah kehilangan nilainya lebih dari 20 persen. (Ahval, 2022).

Erdoğan berkeinginan untuk membentuk era baru bagi Turki dan Arab Saudi. Sebagaimana pernyataan Erdoğan berikut: “Kami yakin pertemuan ini menjadi menjadi dimulainya era baru dalam hubungan antara kedua negara. Kami bersama Saudi telah berkeinginan untuk meningkatkan hubungan”. Kerja sama ekonomi yang hendak ditingkatkan Turki bersama Arab Saudi yakni pada bidang energi, kesehatan, ketahanan pangan, keuangan, teknologi pangan, dan lainnya (Cakmak, 2022). Lebih lanjut, Presiden Erdoğan dan Putra Mahkota MBS telah sepakat untuk memfasilitasi perdagangan bilateral

antara kedua negara. Hal ini bertujuan untuk mengeksplorasi peluang investasi antara kedua belah pihak (Ahval, 2022). Selain itu, Turki dan Saudi berjanji untuk meningkatkan kerja sama di bidang listrik, energi terbarukan, inovasi dan teknologi bersih. Kedua negara juga telah sepakat untuk mengembangkan kemitraan produksi dan investasi di bidang kecerdasan buatan, teknologi digital, serta mendorong kerja sama terhadap pelaku sektor swasta yang beroperasi di bidang ekonomi (Ahval, 2022).

Kunjungan Presiden Erdoğan ke Mekkah merupakan salah satu upaya Turki untuk menarik dukungan keuangan dari negara-negara Teluk yang kaya energi. Hal ini disebabkan krisis ekonomi yang dihadapi Turki dengan melonjaknya inflasi serta jatuhnya mata uang Turki (Bimo, 2022). Menurut Ali Shihabi, seorang analisis politik Saudi, kunjungan Erdoğan dipandang sebagai kemenangan bagi Arab Saudi yang hendak bergerak maju. Shihabi menyatakan: "Presiden Erdoğan diisolasi kemudian menanggung harga ekonomi yang tinggi dalam kerugian yang sangat besar sebab boikot dari negara-negara Teluk. Oleh sebab itu, Erdoğan yang berkunjung ke Saudi". Kunjungan tersebut memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Turki membutuhkan arus pariwisata dan perdagangan dari Arab Saudi, sementara Arab Saudi akan mendapatkan manfaat jika Turki menunjukkan keberpihakan dalam berbagai persoalan regional, yang pada gilirannya dapat membuka peluang bagi Arab Saudi untuk membeli senjata dari Turki (Bimo, 2022).

Menurut penasihat Timur Tengah untuk International Crisis Group, Dina Esfandiary, kepentingan ekonomi adalah faktor pendorong paling utama yang dilakukan Erdoğan dalam normalisasi Turki terhadap Arab Saudi. Turki dinilai telah melupakan kasus pembunuhan jurnalis guna menghadapi krisis ekonomi yang dihadapi oleh Turki dengan melonjaknya inflasi mencapai 61,14 persen serta adanya protes yang terjadi di jalanan Turki yang menyebabkan rusaknya popularitas Erdoğan menjelang pemilihan Presiden. Dewasa ini, Erdoğan berupaya untuk mencari dukungan dari negara-negara Teluk, sebagai negara yang mengalami perselisihan dengan Turki dalam satu dekade terakhir. Tahun 2017 merupakan kunjungan terakhir Erdoğan ke Arab Saudi dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan antara Qatar dengan Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya (Bimo, 2022).

Saat ini, Presiden Erdoğan dan Putra mahkota MBS memiliki satu tujuan untuk menormalkan hubungan kedua negara. Setelah pertemuan kedua belah pihak, dikeluarkan sebuah pernyataan bersama untuk memulai era baru hubungan bilateral kedua negara, termasuk pembatasan perdagangan, dan memungkinkan adanya pertukaran mata uang. Hal ini disebabkan Turki sedang menghadapi krisis ekonomi serta mata uang yang sangat terdepresiasi, disertai dengan naiknya harga bahan bakar dan kini diperparah dampak invasi Rusia ke Ukraina. Pada akhir tahun lalu Lira Turki telah kehilangan lebih dari setengah nilainya (Faruq, 2022).

Pinar Dost, wakil direktur Dewan Atlantik di Turki, menyatakan bahwa pemulihan hubungan yang dilakukan oleh Turki merupakan bagian dari langkah normalisasi yang lebih luas dengan negara-negara Timur Tengah. Baginya, normalisasi hubungan dengan negara-negara tersebut merupakan salah satu upaya untuk masuk ke dalam kalkulus regional, di mana kepentingan ekonomi turut memainkan peran penting. Arab Saudi merupakan pasar penting bagi Turki untuk barang dan pariwisata. Sebab itu, berhentinya larangan Arab Saudi terhadap perdagangan dengan Turki dapat membantu meringankan krisis ekonomi yang dihadapi Turki (Faruq, 2022). Selain itu, pemulihan hubungan ini juga dianggap sebagai upaya untuk meyakinkan Arab Saudi agar meningkatkan produksi minyak. Langkah tersebut bertujuan untuk menurunkan harga bahan bakar global yang saat ini melambung tinggi (Faruq, 2022).

Menurut beberapa pemerhati regional, melihat perkembangan yang terjadi adanya perubahan sikap dari Presiden Erdoğan, yang mendukung pendukung penuh kelompok Ikhwanul Muslimin, ini dinilai sebagai ancaman bagi negara-negara Teluk. Ketika Putra Mahkota Saudi MBS berkunjung ke Ankara dengan menerima penyerahan tanpa syarat dari Erdoğan. Ahli strategi pasar berkembang di Bluebay Asset Management, Timothy Ash menyebutkan: “Melihat Turki saat ini menandakan betapa ketatnya posisi keuangan yang sedang mengalami keputusasaan dalam memperoleh uang tunai dan secara politisi hal ini betapa sulit bagi Erdoğan.” Saudi membutuhkan Turki untuk dapat mengurangi pengaruh Iran di negara-negara Arab (Mashuri, 2022).

Normalisasi yang dilakukan Arab Saudi ini juga sebagai bagian dari Visi Arab Saudi 2030 yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera. Hal ini sejalan dengan konsep modernisasi dalam ilmu sosial, yang merujuk pada proses perubahan dari kondisi yang kurang berkembang menuju keadaan yang lebih maju, demi tercapainya kemajuan, kesejahteraan, dan kehidupan yang lebih modern (Sholihah dkk., 2023).

Respons terhadap Normalisasi Hubungan Turki dan Arab Saudi

Dipandang dari sisi sejarah maupun kontribusi terhadap dinamika global, Turki dan Arab Saudi merupakan negara yang keberadaannya telah diperhitungkan di dunia internasional. Selain itu kedua negara tersebut didukung dengan kekuatan ekonomi yang dimiliki serta pengaruhnya di kawasan. Sebab itu semakin baik citranya di dunia internasional maka semakin mudah pula bagi Turki dan Saudi untuk mencapai kepentingannya masing-masing. Turki dikenal dengan “Vision 2023” sedangkan Arab Saudi dikenal dengan “Arab Vision 2030”.

Dalam persaingan untuk mendapatkan pengaruh terhadap dunia internasional terkhusus negara-negara Arab, kedua negara menggunakan kekuatan *soft power* yang dimiliki untuk memperoleh tujuan yang dicapai. Kasus pembunuhan Jurnalis Arab Saudi, Jamal Khashoggi, pada tahun 2018 silam menjadi era baru bagi kedua belah pihak. Atas kasus tersebut, Arab Saudi mendapat tekanan dari dunia internasional, di mana Putra Mahkota Saudi MBS, dianggap sebagai dalang pembunuhan tersebut. Dampak dari kasus pembunuhan tersebut membuat citra buruk bagi MBS dan Arab Saudi di dunia Internasional dan secara tidak langsung menjadi penghambat serta penghalang atas visi 2030 yang rencanakan Saudi. Di sisi lain, Turki sebagai aktor pertama dalam penyelidikan kasus tersebut memperoleh citra baik di mata internasional.

Arab Saudi selama ini dipandang sebagai negara yang memiliki pengaruh besar bagi negara-negara Timur Tengah dan dunia internasional. Kehadiran Turki menjadi persaingan tersendiri bagi eksistensi Arab Saudi. Dalam dunia perpolitikan internasional, persaingan antar negara akan selalu terjadi tergantung atas kepentingan yang hendak dituju. Persaingan antara Turki dan Arab Saudi memiliki dua aspek utama yang hendak dicapai. Pertama, keduanya berupaya mempertahankan status sebagai negara pemimpin dunia Islam, mengingat keduanya memiliki sejarah panjang dalam memimpin komunitas Muslim. Kedua, mereka berusaha membangun citra positif di mata dunia internasional.

Presiden Turki Erdoğan dan Putra Mahkota Arab Saudi MBS telah sepakat untuk membangun era baru kerja sama hubungan bilateral pada berbagai bidang seperti bidang politik, militer, ekonomi, keamanan serta budaya (Ahval, 2022). Kedua belah pihak telah berupaya untuk memperbaiki kembali hubungan kedua negara yang sempat berselisih akibat kasus pembunuhan Jurnalis. Selain itu adanya perbedaan yang mendalam atas kebijakan regional di antaranya dukungan Turki terhadap Ikhwanul Muslimin dan kasus perang Libia.

Beragam respons yang dilontarkan beberapa pihak terhadap kebijakan yang diambil oleh Turki dan Saudi. Pemulihan hubungan tersebut memunculkan banyak penentangan

serta penolakan dari masyarakat Turki atas kebijakan yang diambil oleh Erdoğan. Banyak masyarakat Turki yang kaget ketika Erdoğan melakukan kunjungan ke Arab Saudi dan memeluk Putra Mahkota MBS. Erdoğan dianggap telah memerintahkan langsung atas pembunuhan Jamal Khashoggi. Selain itu, pasca pemindahan kasus tersebut ke Arab Saudi, Erdoğan mendapat kecaman dari kelompok hak asasi manusia (Ahval, 2022).

Menurut survei yang dilakukan oleh Zer Sencar pada lembaga Rise Metropoll di Ankara, sebanyak 60 persen masyarakat Turki memiliki pandangan negatif atas normalisasi Turki terhadap Arab Saudi. Sedangkan masyarakat yang memandang positif hanya sekitar 29 persen dari jumlah penduduk Turki. Kemal Kılıçdaroğlu, Oposisi utama Pemimpin Partai Rakyat Republik (CHP), menyebutkan bahwa Erdoğan akan mendukung orang-orang yang memerintahkan pembunuhan Jurnalis Khashoggi tersebut. Di mana Pangeran MBS menyangkal keterlibatan dalam kasus pembunuhan tersebut (Ahval, 2022). Lebih lanjut, lawan politik Erdoğan menilai bahwa Erdoğan terlibat dalam kasus pembunuhan Jurnalis Khashoggi, dengan mendapatkan imbalan dana dari Arab Saudi untuk membantu meringankan krisis ekonomi Turki.

Lebih lanjut, terdapat sejumlah pihak yang memandang negatif langkah normalisasi hubungan yang dilakukan Turki terhadap Arab Saudi. Misalnya, Qatar menyatakan kekecewaannya terhadap kebijakan tersebut. Selain itu, beberapa partai politik dan kelompok masyarakat di Aljazair turut mengutuk perjanjian yang disepakati antara Turki dan Arab Saudi (Al-Arian, 2020). Negara-negara tersebut telah membangun pendekatan politik Islam sebagai usaha dalam melawan normalisasi hubungan antara Turki dan Arab Saudi. Namun di sisi lain juga terdapat pihak yang memandang positif normalisasi tersebut. Seperti Bahrain, Sudan, Mesir, Yordania, Perancis dan Inggris. Presiden Mesir Abdel Fattah El Sisi merupakan sekutu dekat Turki menghargai usaha Turki dan Arab Saudi untuk mencapai kedamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah.

KESIMPULAN

Turki dan Arab Saudi mempunyai kepentingan yang sama dalam memperluas kerja sama bilateral antar kedua negara di berbagai bidang khususnya bidang politik, ideologi keamanan, dan ekonomi. Dalam memperkuat hubungannya dengan Arab Saudi, Turki memiliki beberapa kepentingan sebab adanya politik internasional dan ekonomi global. Turki menganggap Arab Saudi sebagai mitra penting dalam pengakuan Turki terhadap dunia internasional dan ekspansi perekonomiannya. Di sisi lain, Arab Saudi memiliki kepentingan pada keunggulan Turki pada bidang industri kemiliteran, teknologi dan akademisi. Selain itu, pemulihan hubungan dengan Arab Saudi memberi jalan baru bagi perdagangan Turki yang kemudian membantu terciptanya stabilitas di kawasan Timur Tengah. Turki secara umum mempunyai kepentingan yang lebih besar daripada Arab Saudi dalam menjaga hubungan tersebut. Keuntungan politik dan ekonomi yang dimiliki Arab Saudi menjadi daya Tarik sendiri bagi dunia internasional terkhusus bagi Turki. Di sisi lain, Arab Saudi juga memandang kerja sama ekonomi dengan Turki dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang melemah akibat pandemi Covid-19 dan turunnya harga minyak mentah dunia, serta sebagai langkah dalam diversifikasi ekonomi.

Normalisasi hubungan antara Turki dan Arab Saudi memunculkan beragam respon dari berbagai kalangan. Beberapa pihak yang memandang negatif normalisasi yang dilakukan Turki terhadap Arab Saudi. Seperti Qatar yang merespons kekecewaannya terhadap Turki atas normalisasi tersebut. Kemudian, beberapa partai politik dan kelompok masyarakat Aljazair. Adapun pihak yang memandang positif normalisasi tersebut. Seperti Bahrain, Sudan, Mesir, Yordania, Perancis dan Inggris. Negara-negara tersebut menghargai usaha Turki dan Arab Saudi untuk mencapai kedamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahval. (2022). Saudi Arabia, Turkey Announce New Era of Cooperation in Bilateral Ties. *Ahvalnews*. <https://ahvalnews.com/saudi-turkey/saudi-arabia-turkey-announce-new-era-cooperation-bilateral-ties>
- Al-Arian, A. (2020, Juni 5). Qatar-Gulf Crisis: Your Questions Answered. *Aljazeera*. <https://www.aljazeera.com/features/2020/6/5/qatar-gulf-crisis-your-questions-answered>
- Alfian, M. A. (t.t.). *Militer dan Politik di Turki*. Penjuru Ilmu sejati.
- Al-Haj, S. (2017). Analysis: The Implications of the Qatar-Turkey Alliance. *Aljazeera.com*. <https://www.aljazeera.com/features/2017/6/18/analysis-the-implications-of-the-qatar-turkey-alliance>
- Avni, B. (2014). Turkey Loses U.N. Security Council Seat in Huge Upset. *Newsweek*. <https://www.newsweek.com/venezuela-malaysia-angola-new-zealand-win-un-council-seats-277962>
- Aydintasbas. (2018). Erdoğan The Nationalist Vs Erdoğan The Islamist. *Hoover Institution*. <https://www.hoover.org/research/Erdoğan-nationalist-vs-Erdoğan-Islamist>
- Balta, E. (2024). Turkey's Foreign Policy after the 2023 Elections: Strategic Balancing in a Polarized Region. *Foreign Affairs Review*.
- Barston, R. P. (2014). *Modern Diplomacy*. Routledge.
- Bimo, E. S. (2022, April 30). Turki dan Arab Saudi Sepakat Perbaiki Hubungan saat Erdoğan Berkunjung ke Riyadh. *Kompas*. https://www.kompas.tv/article/284771/turki-dan-arab-saudi-sepakat-perbaiki-hubungan-saat-Erdoğan-berkunjung-ke-riyadh#google_vignette
- Cakmak, B. N. (2022, April 20). Erdoğan: Turki dan Arab Saudi Berupaya Tingkatkan Semua Jenis Hubungan. *Anadolu Agency*. <https://www.aa.com.tr/id/dunia/Erdoğan-turki-dan-arab-saudi-berupaya-tingkatkan-semua-jenis-hubungan/2575911>
- Callamard, A. (2019). *The Report of the Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary, or Arbitrary executions: Investigation into the unlawful death of Mr. Jamal Khashoggi*.
- Chulov, M. (2018, Oktober). Jamal Khashoggi: Murder in The Consulate. *The Guardian News*. <https://www.theguardian.com/world/2018/oct/21/death-of-dissident-jamal-khashoggi-mohammed-bin-salman>
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approach*. Sage Publication.
- Crocker, R. (2018). Saudi Arabian-Turkish Rivalry in the Middle East. *Middle East Policy Council, XXV*. <https://mepc.org/journal/Saudi-arabian-Turkish-rivalry-middle-east>
- Daily Sabah. (2024). Saudi-Turkish Economic Ties Enter 'Golden Era.' *Daily Sabah*. dailysabah.com
- Faruq, K. (2022, Juni 25). Turki Kesulitan Keuangan, Erdoğan Terpaksa "Berdamai" dengan Arab Saudi. *Ivoox*. https://ivoox.id/turki-kesulitan-keuangan-Erdoğan-terpaksa-berdamai-dengan-arab-saudi?tag_from=turki-arab-saudi
- Joseph, S. N. (2018). Public Diplomacy and Soft power. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social*.
- Kadriyah, S. M., & Aziz, A. (2024). Tantangan & Dinamika Politik Gender di Dunia Islam: Analisis Komparatif Mesir, Turki, Dan Arab Saudi. *Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam*, 20(1), 141-165.
- King, T. (t.t.). Secularism in France. *Prospect Magazine*. <https://www.prospectmagazine.co.uk/magazine/secularisminfrance>

- Kusumadewi, A. (2017, Juni 11). Di Balik Keputusan Erdoğan “Bentengi” Qatar dari Saudi. *Kumparan News*. <https://kumparan.com/kumparannews/di-balik-keputusan-erdogan-bentengi-qatar-dari-saudi>
- Mahatma, F. (2019). Arab Saudi Serukan Boikot Liburan ke Turki dan Semua Produknya, Buntut Pembunuhan Jamal Khashoggi. *Tribun News*. <https://wartakota.tribunnews.com/2019/07/12/arab-saudi-serukan-boikot-liburan-ke-turki-dan-semua-produknya-buntut-pembunuhan-jamal-khashoggi>
- Mashuri, I. K. (2022, Juni 27). Turki Kembali ke Lingkungan Arab. *Republika*. <https://www.republika.id/posts/29353/turki-kembali-ke-lingkungan-arab>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis*. Sage Publication.
- Newsweekme. (2017). Doha"s Actions May Destabilize the Region: Saudi Minister. *Newsweekme*. <https://newsme.com/dohas-actions-may-destabilize-the-region-saudi-minister/>
- Ozkan, M. (2017). Turkey In the Islamic World: An Institutional Perspective. *Foundation for Middle East and Balkan Studies*, 169.
- Ozturk, A. E. (2022). Between Islamic Brotherhood and Realpolitik: Turkey–Saudi Arabia Relations. *Middle East Critique*.
- Parti, A. (2012). 2023 Siyasi Vizyonu: Siyaset, Toplum, Dünya (Political Vision 2023: Politics, Society, World). *AK Parti Genel Merkezi*.
- Patton, M., & Cochran, M. (2002). *A Guide to Using Qualitative Research Methodology*. Medicins Sans Frontieres.
- Pristiandaru, D. L. (2022, April 30). Erdoğan: Turki dan Arab Saudi Akan Aktifkan Potensi Ekonomi Akbar. *Kompas*. <https://www.kompas.com/global/read/2022/04/30/214500870/Erdoğan--turki-dan-arab-saudi-akan-aktifkan-potensi-ekonomi-akbar?page=all>
- Saudeli, G. (2018, November 10). A timeline of Jamal Khashoggi Murders. *DW News*. <https://www.dw.com/en/a-timeline-of-jamal-khashoggis-murder/a-46228007>
- Sholihah, N., Ummah, A. K., Wargadinata, W., & Jannah, H. (2023). Transformation of the Roles of Saudi Arabian Women Post-Implementation of the “Saudi Vision 2030” in the Perspective of Modernism. *Center of Middle Eastern Studies (CMES)*, 16(2), 201–210. <https://doi.org/10.20961/cmcs.16.2.69354>
- Suprio, A. (2013). Inilah Akar Konflik Arab Saudi dan Ikhwanul Muslimin. *Republika*. <https://www.republika.co.id/berita/msl0c5/inilah-akar-konflik-arab-saudi-dan-ikhwanul-muslimin>
- Tekines, K. (2023). Regional Realignment after the Gulf Reconciliation: Turkey’s Strategy Toward the GCC States. *Turkish Journal of International Relations*.
- Ustun, C. (2010). *Turkey and European Security Defence Policy*. Tauris Academic Studies.
- Wearing, D. (2018, November 16). One Month After Jamal Khashoggi’s Killing, What’s Left of Saudi Soft power? *Frieze News*. <https://frieze.com/article/one-month-after-jamal-khashoggis-killing-whats-left-saudi-soft-power>
- Wijaya, A. M. (2024). Analisis Politik Luar Negeri Arab Saudi Dalam upaya Melakukan Normalisasi Arab Saudi-Israel. *Journal of Integrative International Relations*, 9(2), 70–81. <https://doi.org/10.15642/jiir.2024.9.2.70-81>